



Peran PKn Dalam Membentuk Kompetensi Demokrasi Digital Pada Siswa Sekolah Dasar di Era Digital: Sebuah Model Konseptual Terintegrasi

Ni Luh Made Ari Krisna Yanti*, Dewa Bagus Sanjaya, I Nengah Suastika
Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia
*arikrisnayanti701@gmail.com

Abstract

The development of digital technology has transformed social interaction patterns and character formation among elementary school students, posing serious challenges to instilling democratic values such as tolerance, communication ethics, and social responsibility. This study aims to analyze the role of Civic Education (PKn) in fostering a democratic spirit, identify implementation challenges, and develop a conceptual model as the research novelty. This research employed a qualitative descriptive method through systematic literature review and in-depth interviews with teachers at SD Negeri 2 Tabanan. The findings reveal that the main challenges lie not only in students' digital literacy but also in the gap in teachers' digital competence, the absence of evaluation instruments for democratic behavior in digital spaces, and the weak school-family-community tripartite collaboration. The novelty of this research is the Integrated Conceptual Model (ICM), which connects four main components: digital democracy pedagogy, digital literacy for teachers and students, tripartite collaboration, and digital behavior evaluation instruments. This model serves as the article's original contribution to holistically integrating democratic education, character education, and digital literacy at the elementary school level. In conclusion, the successful formation of a democratic spirit in the digital era can only be achieved through the implementation of the ICM that combines participatory learning, critical use of technology, and digital behavior-based evaluation.

Keywords: Civic Education; Democracy; Digital Literacy; Integrated Conceptual Model; Elementary School

Abstrak

Perkembangan teknologi digital mengubah pola interaksi dan karakter siswa sekolah dasar, sehingga menimbulkan tantangan serius dalam penanaman nilai demokrasi seperti toleransi, etika komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam mewujudkan jiwa demokrasi, mengidentifikasi tantangan implementasinya, serta mengembangkan model konseptual yang menjadi kebaruan penelitian. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan sistematis dan wawancara mendalam dengan guru SD Negeri 2 Tabanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya terletak pada literasi digital siswa, tetapi pada kesenjangan kompetensi digital guru, belum adanya instrumen evaluasi perilaku demokratis di ruang digital, serta lemahnya kolaborasi tripartit sekolah-keluarga-masyarakat. Kebaruan penelitian ini adalah ditemukannya *Integrated Conceptual Model (ICM)* atau Model Konseptual Terintegrasi yang menghubungkan empat komponen utama: pedagogi demokrasi digital, literasi digital guru dan siswa, kolaborasi tripartit, serta

instrumen evaluasi perilaku digital. Model ini menjadi kontribusi orisinal penelitian dalam mengintegrasikan pendidikan demokrasi, pendidikan karakter, dan literasi digital secara holistik pada jenjang sekolah dasar. Kesimpulannya, keberhasilan pembentukan jiwa demokrasi di era digital hanya dapat dicapai melalui penerapan MKT yang memadukan pembelajaran partisipatif, pemanfaatan teknologi kritis, dan evaluasi berbasis perilaku digital.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan; Demokrasi; Literasi Digital; Model Konseptual Terintegrasi; Sekolah Dasar

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam era globalisasi telah menghadirkan transformasi mendasar dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk bidang pendidikan dasar. Kehadiran internet, media sosial, permainan daring, serta beragam platform komunikasi digital telah membentuk pola interaksi baru di kalangan peserta didik sekolah dasar. Ma & Cheng (2023) menegaskan bahwa peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) pada generasi muda telah mengubah secara fundamental pola komunikasi dan interaksi sosial mereka, khususnya dalam kehidupan sehari-hari yang kini banyak berlangsung di ruang digital.

Di satu sisi, kondisi ini membuka peluang signifikan bagi perluasan akses informasi dan inovasi pembelajaran, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai persoalan sosial dan moral yang berdampak pada proses pembentukan karakter peserta didik. Sejumlah temuan empiris dalam literatur akademik menunjukkan adanya kecenderungan yang perlu dicermati terkait perkembangan sikap demokratis dan etika digital pada anak usia sekolah dasar. Penelitian sistematis mengenai literasi digital yang dilakukan oleh Anisti, Sidarta, Imran & Syatir (2025) menunjukkan bahwa meskipun Generasi Z merupakan *digital native* yang akrab dengan teknologi sejak dini, mereka masih menghadapi keterbatasan dalam literasi digital, khususnya pada aspek kognitif, algoritmik, dan etika.

Hal tersebut tercermin dalam rendahnya kesadaran terhadap isu privasi, keamanan data, tanggung jawab sosial dalam bermedia, serta dampak jangka panjang dari aktivitas daring. Lebih lanjut, Febrianti (2024) mengungkapkan bahwa anak usia sekolah dasar menghadapi dilema antara kecakapan teknis mengoperasikan gawai dengan rendahnya kesantunan berkomunikasi di ruang siber, yang ditandai dengan meningkatnya paparan terhadap perilaku tidak santun dan melemahnya empati digital. Data tersebut mengindikasikan bahwa problem seperti rendahnya toleransi, minimnya penghargaan terhadap perbedaan pendapat, meningkatnya kasus *cyberbullying*, penyebaran informasi palsu, serta melemahnya etika komunikasi digital merupakan realitas empiris yang menuntut respons edukatif yang sistematis.

Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga memiliki tanggung jawab strategis dalam membentuk warga negara yang demokratis dan beretika di era digital, sebagaimana ditegaskan oleh Seprie, Hendri & Cahyono (2024) serta Vallès-Peris & Domènech (2024) bahwa integrasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam pembelajaran digital mampu meningkatkan literasi demokrasi siswa sekolah dasar. Demokrasi digital adalah praktik demokrasi yang berlangsung di ruang virtual, mencakup partisipasi, deliberasi, dan pengambilan keputusan kolektif berbasis teknologi digital (Miladi, 2020).

Dalam penelitian ini, demokrasi digital dioperasionalkan menjadi empat indikator kompetensi pada siswa sekolah dasar: toleransi digital, musyawarah digital, tanggung jawab digital, dan etika komunikasi digital. Dalam konteks tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menempati posisi strategis sebagai instrumen pembentukan karakter dan penguatan demokrasi sejak jenjang pendidikan dasar. PKn tidak semata-mata dipahami sebagai mata pelajaran yang menekankan aspek pengetahuan kenegaraan dan konstitusi, tetapi juga sebagai wahana internalisasi nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, musyawarah, tanggung jawab, keadilan, penghargaan terhadap keberagaman, serta kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara (Rumiati et.al, 2023).

Melalui pembelajaran PKn, peserta didik diarahkan untuk memahami praktik kehidupan demokratis tidak hanya dalam ruang sosial konvensional, tetapi juga dalam konteks ruang digital yang semakin dominan. Oleh karena itu, integrasi antara pendidikan demokrasi dan literasi digital menjadi penting agar peserta didik mampu berkembang sebagai warga digital yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, Ninawati (2025) menegaskan bahwa kurikulum PKn memiliki peran strategis dalam membekali generasi muda dengan keterampilan hidup dan kesiapan karier melalui tiga dimensi kewarganegaraan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewarganegaraan.

Penelitian sebelumnya mengenai pendidikan demokrasi dalam pembelajaran PKn telah banyak dilakukan, namun masih terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu dikritisi. Penelitian Kurniawan (2020) menekankan peran guru PKn dalam memperkuat nilai multikultural dan karakter kewarganegaraan peserta didik, namun analisisnya masih terbatas pada konteks pembelajaran tatap muka konvensional sehingga kurang mengakomodasi dinamika ruang digital yang kini menjadi ruang interaksi utama peserta didik. Selain itu, integrasi nilai kewarganegaraan dalam pembelajaran berbasis digital dapat meningkatkan literasi demokrasi siswa sekolah dasar, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala berupa kesiapan pendidik dan infrastruktur pendukung. Di sisi lain, Ma & Cheng (2023) menyoroti pengaruh penggunaan ICT terhadap perilaku sosial generasi muda, tetapi belum secara spesifik mengkaji peran PKn sebagai mekanisme mitigasi terhadap dampak negatif tersebut pada tingkat pendidikan dasar. Berdasarkan telaah tersebut, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan penelitian. Pertama, pada level teoretis, belum terdapat kerangka konseptual yang secara integratif menghubungkan pendidikan demokrasi, nilai-nilai PKn, dan literasi digital dalam konteks sekolah dasar, karena sebagian besar model masih berorientasi pada pendidikan menengah atau tinggi (Firdaus & Abdulkarim, 2022).

Kedua, pada level empiris, masih terbatas penelitian yang melakukan sintesis sistematis terhadap berbagai temuan mengenai implementasi PKn dalam membentuk sikap demokratis di era digital pada jenjang sekolah dasar. Ketiga, pada level kontekstual, penelitian yang ada cenderung menitikberatkan pada aspek kognitif kewarganegaraan Megasari et al., (2025) sementara dimensi afektif dan psikomotorik, khususnya dalam praktik etika digital, belum memperoleh perhatian yang seimbang. Dengan demikian, studi ini menawarkan kontribusi dengan mengkaji secara komprehensif peran PKn dalam membentuk jiwa demokrasi di era digital melalui pendekatan sintesis literatur ilmiah.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya penguatan karakter demokratis sejak usia dini di tengah derasnya arus digitalisasi. Anak usia sekolah dasar berada pada fase krusial pembentukan nilai dan perilaku sosial, sehingga internalisasi nilai demokrasi perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Ma & Cheng (2023) menegaskan bahwa penggunaan teknologi digital tanpa pendampingan yang memadai dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan sosial dan perilaku generasi muda. Jika tidak diimbangi dengan

pendidikan karakter yang memadai, perkembangan teknologi digital berpotensi membentuk kecenderungan individualistik, intoleran, serta rendahnya etika komunikasi sosial (Indriyana, 2025). Oleh karena itu, pembelajaran PKn perlu diarahkan tidak hanya pada penguatan aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap dan praktik demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di ruang digital. Implementasi nilai demokrasi dapat dilakukan melalui berbagai strategi pembelajaran partisipatif seperti diskusi kelompok, musyawarah kelas, simulasi pemilihan, pembelajaran berbasis proyek, serta pemanfaatan media digital interaktif yang mendorong kerja sama, partisipasi, dan kemampuan berpikir kritis siswa (Sonita & Zainil, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk jiwa demokrasi pada siswa sekolah dasar di era digital, mengidentifikasi berbagai tantangan implementasinya, serta mengeksplorasi strategi pembelajaran yang relevan dalam menanamkan nilai demokrasi di tengah perkembangan teknologi. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan wawancara lapangan. Rincian mengenai sumber data, teknik pengumpulan, dan analisis data akan dijelaskan pada bagian metode.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya integrasi pendidikan demokrasi, pendidikan karakter, dan literasi digital dalam pembelajaran PKn. Sintesis literatur menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam pengembangan model evaluasi efektivitas pembelajaran PKn dalam konteks digital. Penelitian terkini merekomendasikan perlunya pengembangan model pembelajaran digital yang mengintegrasikan nilai kewarganegaraan, keterampilan berpikir kritis, dan etika digital (Damanik & Kedhaton, 2026). Namun demikian, studi longitudinal mengenai dampak jangka panjang dari pendekatan tersebut masih sangat terbatas. Tren penelitian mutakhir menunjukkan peningkatan penggunaan media digital interaktif seperti simulasi video, kuis daring, dan diskusi virtual dalam pembelajaran PKn. Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi guru tidak hanya difokuskan pada aspek teknis penggunaan teknologi, tetapi juga pada pemahaman filosofis tentang pendidikan demokrasi di era digital (Firdaus & Abdulkarim, 2022). Jadi, integrasi PKn dan literasi digital tidak sekadar merupakan adaptasi teknologi, melainkan transformasi nilai dan cara berpikir dalam membentuk warga negara yang kritis, empatik, dan demokratis.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kombinasi studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara lapangan. Penelitian bertujuan menganalisis peran PKN dalam mewujudkan jiwa demokrasi di era digital pada siswa sekolah dasar. Sumber data primer diperoleh dari penelitian jurnal terindeks, buku, disertasi, dan tesis yang relevan, serta dari hasil wawancara dengan guru kelas yang mengajar di SD Negeri 2 Tabanan, yang dipilih secara purposif. Data sekunder diperoleh dari laporan penelitian, prosiding, dan dokumen kebijakan pendidikan terbitan 2015-2025. Instrumen yang digunakan adalah lembar pencatatan dokumenter dan pedoman wawancara semi-terstruktur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis di basis data akademik (*Google Scholar*, *Scopus*, *Portal Garuda*) serta wawancara langsung kepada guru kelas V SD Negeri 2 Tabanan untuk menggali strategi pembelajaran, tantangan, dan penerapan nilai demokrasi di ruang digital. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam kategori tematik (nilai demokrasi, tantangan digital, peran PKN, strategi pembelajaran), dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Jiwa Demokrasi Siswa Sekolah Dasar di Era Digital

Peran PKn dalam membentuk jiwa demokrasi siswa sekolah dasar di era digital pada dasarnya bergerak dalam ruang pertemuan antara nilai-nilai kewarganegaraan klasik dan dinamika kehidupan digital yang semakin dominan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa PKn tetap memiliki posisi yang sangat penting dalam membangun fondasi karakter demokratis, terutama ketika proses pembelajaran mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Gandamana et al., (2025) menunjukkan bahwa pendekatan *Project Citizen Digital* dapat memperkuat *civic literacy* siswa melalui pengalaman belajar yang menghubungkan nilai demokrasi dengan praktik digital yang dekat dengan kehidupan mereka.

Pendapat yang sama disampaikan Eksara (2025) menyatakan bahwa PKn tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran normatif, tetapi juga sebagai ruang pembentukan digital *citizenship* yang mempersiapkan siswa menghadapi kompleksitas *Society 5.0* melalui internalisasi nilai Pancasila yang lebih kontekstual. Bahkan, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran PKn terbukti mampu memperdalam pemahaman siswa terhadap nilai-nilai demokrasi sekaligus meningkatkan literasi digital mereka (Shefira, Dewi & Octaviani, 2024). Dalam kerangka ini, PKn dapat dipahami sebagai jembatan penting yang menghubungkan pendidikan karakter dengan realitas kehidupan digital anak.

Namun, di balik potensi tersebut, implementasi PKn dalam membentuk demokrasi digital masih menghadapi sejumlah tantangan yang tidak sederhana. Berbagai studi menunjukkan bahwa asumsi mengenai generasi digital *native* yang otomatis memiliki kecakapan digital ternyata tidak sepenuhnya tepat. Wineburg (2024) justru menemukan bahwa sebagian besar siswa masih kesulitan membedakan informasi yang valid dan manipulatif, yang mengindikasikan lemahnya literasi media dan etika digital. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ruang digital tidak selalu menjadi ruang yang mendidik secara otomatis, melainkan juga dapat menjadi ruang yang memproduksi perilaku kurang demokratis jika tidak disertai pendampingan pedagogis yang memadai.

Hal ini diperkuat oleh Shefira et al., (2024) yang menegaskan bahwa pembelajaran PKn perlu terus beradaptasi agar mampu merespons dinamika digital secara lebih efektif dan bermakna bagi siswa. Temuan empiris di lapangan memperkuat gambaran tersebut dengan menunjukkan adanya jarak antara apa yang diajarkan di kelas dan bagaimana siswa berperilaku dalam ruang digital. Purna, menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah dan penghargaan terhadap pendapat orang lain sebenarnya telah diajarkan dalam PKn, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya tercermin dalam interaksi digital siswa, baik dalam permainan daring maupun percakapan melalui media sosial (Wawancara, 3 Januari 2026).

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi, di mana nilai yang bersifat normatif belum sepenuhnya berubah menjadi kebiasaan sosial dalam kehidupan digital sehari-hari, meskipun secara konseptual hal tersebut telah banyak ditekankan dalam literatur (Shefira, Dewi & Octaviani, 2024; Hughes, Robb & Gadanidis, 2024). Lebih jauh, tantangan tersebut juga berkaitan erat dengan kapasitas guru dalam mengelola pembelajaran di era digital. Nuryadi, Widiatmaka & Yanto (2023) menunjukkan bahwa sebagian guru masih mengalami keterbatasan dalam memahami budaya digital peserta didik, sehingga proses internalisasi nilai demokrasi dalam konteks digital belum berjalan optimal. Situasi ini juga tercermin dari pengalaman Bapak Purna yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi sering kali lebih cepat dikuasai oleh siswa dibandingkan guru, sehingga diperlukan

proses pembelajaran yang berkelanjutan bagi pendidik itu sendiri (Wawancara, 3 Januari 2026). Di sisi lain, tantangan evaluasi juga menjadi persoalan tersendiri karena perilaku demokratis siswa di ruang digital tidak mudah diamati dan diukur secara langsung, berbeda dengan interaksi di kelas yang lebih terkontrol (Wulandari & Suranto, 2023; Indra & Jasiah, 2024).

Selain faktor pedagogis, pengaruh lingkungan digital juga turut membentuk dinamika perkembangan karakter siswa. Media digital tidak hanya menjadi sarana belajar, tetapi juga ruang sosial yang sangat kuat dalam membentuk cara berpikir dan berperilaku anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun media digital dapat digunakan untuk memperkuat karakter demokratis, proses tersebut tetap dipengaruhi oleh keterbatasan literasi digital, kecemasan teknologi, serta kurangnya dukungan lingkungan keluarga (Nur, Rahma & Muhallim, 2024).

Hal ini terlihat dalam kecenderungan siswa meniru gaya komunikasi kreator konten yang tidak mencerminkan etika dialogis, bahkan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar dalam interaksi sehari-hari (Wawancara, 3 Januari 2026). Dengan demikian, ruang digital tidak dapat dipandang netral, melainkan sebagai ruang yang turut membentuk dan mereproduksi nilai sosial tertentu. Di tengah berbagai tantangan tersebut, terlihat pula bahwa implementasi konsep digital *citizenship* dalam pembelajaran PKN masih belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam praktik pendidikan dasar.

Hughes, Robb & Gadanidis (2024) mengingatkan bahwa pemisahan antara pendidikan demokrasi konvensional dan literasi digital justru melemahkan upaya pembentukan karakter kewargaan yang utuh. Namun menurut Bapak Purna selaku guru kelas di SD No. 2 Tabanan dalam praktiknya, konsep tersebut masih belum secara eksplisit menjadi bagian dari pelatihan guru maupun implementasi kurikulum di sekolah dasar (Wawancara, 3 Januari 2026). Hal ini menunjukkan bahwa integrasi pendidikan demokrasi digital masih berada pada tahap konseptual dan belum sepenuhnya hadir dalam praktik pembelajaran sehari-hari.

Meski demikian, di tengah keterbatasan tersebut muncul pula praktik-praktik adaptif yang tumbuh dari inisiatif guru di lapangan. Purna menyampaikan guru tidak hanya menjalankan kurikulum secara mekanis, tetapi juga berupaya mengontekstualisasikan pembelajaran dengan realitas digital yang dihadapi siswa. Salah satunya melalui pemanfaatan kasus-kasus nyata dari media sosial, seperti fenomena *cyberbullying* dalam grup percakapan siswa, yang kemudian dijadikan bahan refleksi untuk menanamkan nilai Pancasila dan etika demokratis (Wawancara, 3 Januari 2026).

Praktik ini menunjukkan bahwa guru memiliki peran penting sebagai agen reflektif yang mampu menjembatani nilai-nilai abstrak demokrasi dengan pengalaman konkret siswa dalam ruang digital (Nuryadi, Widiatmaka & Yanto, 2023). Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, peran PKN dalam membentuk jiwa demokrasi siswa sekolah dasar di era digital dapat dipahami sebagai proses pembelajaran yang harus bersifat kontekstual, adaptif, dan reflektif. Pendekatan seperti *Project Citizen Digital* terbukti mampu menghubungkan nilai kewarganegaraan dengan pengalaman digital siswa secara lebih bermakna (Gandamana et al., 2025).

Penggunaan media digital edukatif juga menjadi sarana penting untuk memperkuat literasi demokrasi dan kemampuan siswa dalam memahami etika bermedia (Shefira, Dewi & Octaviani, 2024). Selain itu, pendekatan berbasis studi kasus dari pengalaman digital siswa memberikan ruang bagi pengembangan kemampuan berpikir kritis, empati digital, dan penyelesaian konflik secara lebih demokratis (Nur, Rahma & Muhallim, 2024). Pada

akhirnya, dapat ditegaskan bahwa pendidikan demokrasi di era digital tidak lagi dapat dipahami sebagai proses yang terpisah dari teknologi, melainkan sebagai bagian yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari siswa.

Demokrasi digital merupakan perluasan dari praktik demokrasi konvensional yang harus dilatih secara simultan, baik dalam interaksi langsung maupun virtual. Oleh karena itu, keberhasilan PKN dalam membentuk jiwa demokrasi siswa tidak hanya bergantung pada desain kurikulum, tetapi juga pada kemampuan guru untuk terus belajar, beradaptasi, dan menghubungkan nilai-nilai demokrasi dengan realitas digital yang hidup di sekitar peserta didik (Nuryadi, Widiatmaka & Yanto, 2023; Gandamana et al., 2025).

2. Tantangan Implementasi Pendidikan Demokrasi Pada Siswa Sekolah Dasar di Era Digital

Penelitian ini berangkat dari data wawancara dengan Nyoman Purna selaku guru kelas V SD Negeri 2 Tabanan, dengan analisis yang mengacu pada capaian pembelajaran PKN dalam Kurikulum Merdeka fase B dan C. Capaian tersebut mencakup kemampuan peserta didik dalam menghargai keberagaman, berpartisipasi dalam musyawarah, menerapkan nilai-nilai Pancasila, serta menunjukkan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Keempat aspek ini digunakan sebagai lensa analitis untuk memahami bagaimana pendidikan demokrasi diimplementasikan dalam konteks pembelajaran yang kini tidak lagi terbatas pada ruang kelas, tetapi juga meluas ke ruang digital kehidupan siswa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu tantangan paling mendasar terletak pada keterbatasan literasi digital guru. Purna, mengungkapkan bahwa pelatihan yang selama ini diterima lebih banyak berorientasi pada aspek administratif dibandingkan penguatan pedagogi digital dan etika bermedia sosial. Di sisi lain, peserta didik justru berkembang sebagai *digital native* yang lebih cepat menguasai teknologi dibandingkan guru, sehingga menuntut adanya proses belajar mandiri yang berkelanjutan dari pihak pendidik (Wawancara, 3 Januari 2026).

Temuan ini memperkuat pandangan Shefira, Dewi & Octaviani (2024) bahwa integrasi literasi digital dalam PKn merupakan syarat penting agar nilai demokrasi tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan hadir dalam praktik kehidupan siswa. Namun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hambatan utama tidak hanya berada pada siswa, tetapi juga pada kesiapan guru sebagai fasilitator utama pembelajaran demokrasi digital. Keterbatasan tersebut berimplikasi langsung pada pencapaian kompetensi PKn, terutama dalam aspek penerapan nilai Pancasila dan tanggung jawab sosial.

Ketika guru belum sepenuhnya memiliki kapasitas untuk membimbing etika digital, maka nilai-nilai demokrasi yang diajarkan di kelas cenderung tidak terinternalisasi dalam perilaku digital siswa. Dengan demikian, muncul hubungan yang cukup jelas antara rendahnya literasi digital guru dan belum optimalnya integrasi nilai demokrasi dalam kehidupan digital peserta didik. Nuryadi, Widiatmaka & Yanto (2023) juga menegaskan bahwa kesenjangan kompetensi ini menjadi salah satu faktor yang membuat guru kesulitan merespons dinamika budaya digital siswa yang berkembang sangat cepat.

Selain faktor pedagogis, penelitian ini juga menemukan bahwa lingkungan digital memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap pembentukan karakter demokratis siswa. Purna, mengamati bahwa siswa cenderung meniru gaya komunikasi kreator konten di media sosial, terutama yang menggunakan bahasa kasar, saling mengejek, atau merendahkan orang lain, yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam interaksi sehari-hari (Wawancara, 3 Januari 2026). Fenomena ini sejalan dengan temuan Indra & Jasiah (2024)

yang menunjukkan dampak serius *cyberbullying* terhadap kondisi psikologis dan sosial siswa, termasuk meningkatnya kecemasan, penurunan prestasi, hingga isolasi sosial. Dalam konteks ini, media digital tidak lagi sekadar ruang hiburan, tetapi juga ruang sosial yang aktif membentuk pola pikir dan perilaku anak. Kemudian, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya pada paparan konten digital, tetapi pada tidak disadarinya nilai-nilai yang terkandung dalam perilaku digital tersebut oleh siswa. Banyak siswa belum mampu membedakan antara perilaku yang bersifat hiburan dan perilaku yang bertentangan dengan nilai demokrasi, seperti menghargai perbedaan dan menjaga komunikasi yang santun.

Hal ini berdampak pada melemahnya capaian pembelajaran PKn, khususnya dalam aspek penghargaan terhadap keberagaman dan kemampuan berpartisipasi secara demokratis. Japar, Hermanto, Muyaroah, Susila & Alfani (2023) menekankan bahwa pendidikan PKn sebenarnya telah berupaya menanamkan nilai keberagaman melalui berbagai strategi pembelajaran, namun internalisasi nilai tersebut masih lemah ketika berhadapan dengan kuatnya pengaruh budaya digital. Dari sisi pendekatan pembelajaran, penelitian ini juga menemukan bahwa metode yang masih dominan bersifat teoritis menjadi salah satu penghambat utama.

Purna, menyampaikan bahwa pembelajaran PKn sebelumnya banyak berfokus pada ceramah dan hafalan konsep seperti musyawarah, toleransi, dan gotong royong, yang kurang efektif dalam membentuk perilaku demokratis nyata (Wawancara, 3 Januari 2026). Oleh karena itu, guru mulai melakukan inovasi dengan menggunakan pendekatan berbasis studi kasus dari kehidupan nyata siswa, termasuk kasus yang bersumber dari media sosial. Hal ini sejalan dengan gagasan Gandamana et al., (2025) yang menawarkan pendekatan *Project Citizen Digital* sebagai alternatif pembelajaran yang lebih kontekstual dan partisipatif.

Pendekatan berbasis kasus digital tersebut terbukti mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Ketika kasus *cyberbullying* atau konflik di media sosial dijadikan bahan diskusi, siswa lebih mudah memahami makna nilai demokrasi dalam konteks yang mereka alami sehari-hari, serta lebih aktif dalam menyampaikan pendapat. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Nur, Rahma & Muhallim (2024) yang menunjukkan bahwa media pembelajaran digital dapat mengembangkan karakter demokratis, khususnya dalam aspek pengendalian diri, berpikir kritis, kemampuan mendengarkan, serta keterbukaan dalam berkomunikasi.

Dengan demikian, keberhasilan pembelajaran PKn sangat ditentukan oleh sejauh mana pengalaman belajar siswa dapat dikaitkan dengan realitas digital yang mereka hadapi. Namun, penelitian ini juga mengungkap adanya keterbatasan serius dalam sistem evaluasi karakter demokratis di ruang digital. Purna, menyatakan bahwa mereka belum memiliki instrumen khusus untuk menilai perilaku siswa dalam interaksi daring, sehingga penilaian lebih banyak bergantung pada laporan orang tua atau pengaduan dari siswa lain (Wawancara, 3 Januari 2026). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas kehidupan digital siswa yang semakin kompleks dengan sistem evaluasi pendidikan yang masih berorientasi pada interaksi tatap muka.

Wulandari & Suranto (2023) menegaskan bahwa fenomena seperti *cyberbullying* membutuhkan sistem pencegahan dan evaluasi yang lebih terstruktur dan responsif. Kesenjangan tersebut juga mencerminkan bahwa literatur pendidikan demokrasi masih lebih banyak berfokus pada metode pembelajaran dibandingkan pengembangan sistem evaluasi yang mampu menjangkau ruang digital. Hughes, Robb & Gadani (2024) mengkritik bahwa pemisahan antara pendidikan demokrasi dan literasi digital menyebabkan kurangnya pendekatan yang menyeluruh dalam membentuk karakter kewargaan digital. Akibatnya,

keberhasilan capaian pembelajaran PKn belum dapat diukur secara utuh dalam konteks perilaku digital siswa yang justru semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari. Dari keseluruhan temuan, penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor utama yang menentukan keberhasilan pendidikan demokrasi melalui PKn di era digital. Faktor pertama adalah kompetensi digital guru, yang tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan mengontekstualisasikan nilai demokrasi dalam komunikasi digital siswa (Nuryadi, Widiatmaka & Yanto, 2023). Berdasarkan penjelasan Purna, bahwa kemampuan ini banyak diperoleh melalui proses belajar mandiri dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi (Wawancara, 3 Januari 2026), yang menunjukkan pentingnya kapasitas reflektif dan adaptif dalam profesi guru.

Purna juga menambhaknya, faktor kedua adalah dukungan sistemik dari sekolah dan dinas pendidikan. Pelatihan yang masih berfokus pada aspek administratif dinilai belum cukup untuk mendukung transformasi pedagogi berbasis digital (Wawancara, 3 Januari 2026). Wineburg (2024) menegaskan bahwa tanpa dukungan literasi digital yang kuat, ruang digital justru dapat menjadi ruang berkembangnya perilaku negatif. Karena itu, dukungan kelembagaan menjadi kunci dalam membangun ekosistem pendidikan demokrasi digital yang efektif.

Faktor ketiga adalah keterlibatan orang tua dalam mendampingi penggunaan media digital anak. Purna mengamati bahwa siswa yang mendapatkan pengawasan lebih baik dari orang tua cenderung memiliki kemampuan kontrol diri yang lebih kuat dalam penggunaan media digital (Wawancara, 3 Januari 2026). Hal ini sejalan dengan temuan Nur, Rahma & Muhallim (2024) yang menekankan pentingnya dukungan keluarga dalam pembentukan karakter demokratis di era digital, meskipun dalam praktiknya perhatian orang tua masih lebih banyak terfokus pada durasi penggunaan gawai dibandingkan kualitas interaksi digital anak.

Berdasarkan ketiga faktor tersebut, penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar. Guru perlu didukung melalui pelatihan yang berorientasi pada pedagogi digital berbasis nilai demokrasi Gandamana et al., (2025) sekolah perlu mengembangkan sistem evaluasi yang mampu menjangkau perilaku digital siswa Wulandari & Suranto (2023) dan orang tua perlu dilibatkan secara aktif dalam literasi digital keluarga (Nur, Rahma & Muhallim, 2024). Dengan demikian, pembentukan jiwa demokrasi siswa tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi merupakan proses sosial yang melibatkan ekosistem pendidikan secara lebih luas.

3. Strategi Pembelajaran PKn Dalam Menanamkan Nilai Demokrasi di Era Digital

Strategi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi pada siswa sekolah dasar di era digital pada dasarnya perlu dirancang sebagai proses yang adaptif, kontekstual, dan selaras dengan perubahan sosial serta perkembangan teknologi yang sangat cepat. Pembelajaran PKn tidak lagi cukup dipahami sebagai proses transfer konsep demokrasi secara teoretis, tetapi harus hadir sebagai pengalaman belajar yang dekat dengan kehidupan nyata siswa, termasuk interaksi mereka di media sosial, ruang percakapan daring, dan berbagai bentuk komunikasi digital lainnya. Hal ini menjadi penting karena ruang digital tidak hanya menawarkan kemudahan akses informasi, tetapi juga membawa tantangan serius seperti menurunnya etika komunikasi, meningkatnya paparan konten negatif, kasus *cyberbullying*, serta melemahnya sikap toleransi dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks tersebut, strategi pembelajaran PKn perlu

dirancang secara lebih komprehensif agar mampu membentuk peserta didik sebagai warga negara digital yang tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga demokratis, kritis, empatik, dan bertanggung jawab.

a. Strategi Pedagogis

Strategi pertama yang dapat dikembangkan adalah strategi pedagogis yang menekankan pembelajaran berbasis partisipasi aktif siswa. Pendekatan ini diwujudkan melalui diskusi kelompok, musyawarah kelas, simulasi pemilihan ketua kelas, debat sederhana, hingga pembelajaran berbasis proyek yang memberi ruang bagi siswa untuk mengalami langsung praktik demokrasi. Secara teoritis, pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Dewey (1916); dan Piaget (1954) yang menempatkan pengalaman sebagai inti dari proses belajar demokrasi. Melalui keterlibatan aktif tersebut, siswa tidak hanya memahami konsep demokrasi secara kognitif, tetapi juga membiasakan diri dalam praktik sosial yang mencerminkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Hanifah (2026) juga menegaskan bahwa kegiatan reflektif dan pembiasaan literasi dalam pembelajaran PKn dapat memperkuat pemahaman kewarganegaraan sekaligus menumbuhkan sikap demokratis pada peserta didik. Dalam konteks empiris, strategi pedagogis ini masih relevan dan terbukti efektif dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar.

Purna, menyatakan bahwa kegiatan seperti diskusi kelompok dan simulasi pemilihan ketua kelas memberikan ruang bagi siswa untuk belajar menyampaikan pendapat secara santun, menghargai pandangan teman, serta menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah (Wawancara, 3 Januari 2026). Pengalaman ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis praktik memiliki kontribusi nyata dalam membentuk sikap demokratis dalam interaksi langsung di kelas. Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa internalisasi nilai tersebut belum sepenuhnya berlanjut ke ruang digital, sehingga perilaku demokratis yang terbentuk masih terbatas pada konteks luring. Kondisi ini memperkuat pandangan Santrock (2018) bahwa pembelajaran perlu direkonstruksi agar lebih sesuai dengan karakter generasi digital yang hidup dalam dua ruang sekaligus yakni fisik dan virtual.

b. Strategi Pemanfaatan Teknologi Digital

Strategi kedua adalah pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran PKn. Strategi ini mencakup penggunaan video edukatif, *platform* pembelajaran daring, media sosial berbasis pendidikan, kuis interaktif, serta penguatan literasi digital yang berkaitan dengan etika komunikasi dan kemampuan mengenali informasi palsu. Jenkins (2009) serta Helsper dan Eynon (2010) menjelaskan bahwa generasi digital cenderung lebih responsif terhadap pembelajaran berbasis visual dan interaktif, sehingga integrasi teknologi dalam pembelajaran menjadi sangat relevan. Dalam konteks ini, media digital tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran yang memungkinkan siswa memahami demokrasi dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari. Mihardjo (2021) juga menegaskan bahwa media digital memiliki potensi besar sebagai instrumen penguatan literasi digital peserta didik. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran PKn mulai diterapkan, meskipun masih dalam tahap awal dan belum sepenuhnya optimal. Purna, menyampaikan bahwa penggunaan video pembelajaran dan aplikasi interaktif membuat siswa lebih tertarik dan lebih mudah memahami materi demokrasi sekaligus meningkatkan kesadaran mereka terhadap etika digital (Wawancara, 3 Januari 2026). Hal serupa juga disampaikan oleh I Ketut Seni yang melihat bahwa media digital mampu meningkatkan partisipasi siswa serta membantu mereka lebih kritis terhadap informasi yang diterima (Wawancara, 5 Januari 2026).

Di tingkat global, program *Switched On* dari *Webwise* di Irlandia menunjukkan bahwa pendidikan *digital citizenship* sejak usia dini dapat memperkuat kemampuan literasi digital, berpikir kritis, dan keselamatan digital siswa melalui pendekatan yang juga melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Namun demikian, efektivitas strategi ini sangat ditentukan oleh kompetensi digital guru. Purna, mengakui bahwa tidak semua pendidik memiliki kemampuan yang cukup untuk mengintegrasikan teknologi secara kreatif dan kontekstual dalam pembelajaran PKN (Wawancara, 3 Januari 2026), sehingga kesiapan pedagogis menjadi faktor kunci keberhasilannya.

c. Strategi Kolaborasi

Strategi ketiga adalah penguatan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membentuk karakter demokratis peserta didik. Strategi ini mencakup keterlibatan orang tua dalam pengawasan penggunaan media digital, pembiasaan nilai demokrasi di lingkungan keluarga, serta sinergi antara sekolah dan masyarakat dalam program literasi digital. Epstein (2011) dan Lickona (1991) menegaskan bahwa pendidikan karakter tidak dapat berjalan efektif apabila hanya bertumpu pada sekolah, melainkan membutuhkan dukungan ekosistem pendidikan yang lebih luas.

Koeswara (2015) juga menekankan bahwa sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kolaboratif memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung pembentukan jiwa demokrasi siswa di era digital. Purna menjelaskan bahwa sekolah secara rutin melibatkan orang tua melalui pertemuan khusus untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan aktivitas digital anak, sekaligus mendorong penerapan nilai demokrasi dalam keluarga, seperti diskusi bersama dan penghargaan terhadap pendapat anak (Wawancara, 3 Januari 2026).

I Ketut Seni juga menambahkan bahwa siswa yang mendapatkan pembiasaan nilai demokrasi di rumah cenderung lebih mudah menerapkan sikap toleransi, kerja sama, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari (Wawancara, 5 Januari 2026). Program *Switched On* juga memperkuat pendekatan ini melalui materi yang dapat dibawa pulang untuk mendorong dialog antara anak dan orang tua mengenai aktivitas digital mereka. Namun demikian, efektivitas strategi kolaboratif masih menghadapi tantangan, terutama terkait rendahnya kesadaran sebagian orang tua terhadap pentingnya literasi digital berbasis nilai.

Banyak orang tua masih lebih menekankan pada pembatasan durasi penggunaan gawai dibandingkan pada pendampingan terhadap kualitas interaksi dan nilai yang dikonsumsi anak di ruang digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter demokratis di era digital tidak dapat hanya bergantung pada satu institusi, melainkan membutuhkan kesadaran kolektif yang terintegrasi antara sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial secara lebih utuh. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat satu strategi tunggal yang paling efektif dalam membentuk karakter demokratis siswa di era digital. Efektivitas pembelajaran justru lebih optimal ketika strategi pedagogis, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi tripartit diintegrasikan secara simultan.

Tabel 1. Efektivitas Pembelajaran PKn di Era Digital

Strategi	Keunggulan	Keterbatasan	Kondisi Efektif
Strategi pedagogis (partisipatif dan simulasi)	Membentuk perilaku demokratis langsung pengalaman nyata	Belum otomatis tertransfer ke ruang digital	Dikombinasikan dengan studi kasus digital

Strategi pemanfaatan teknologi	Menjembatani pembelajaran dan daring meningkatkan minat siswa	Bergantung pada kompetensi digital guru	Guru memiliki literasi digital memadai
Strategi kolaborasi sekolah-keluarga-masyarakat	Menjamin konsistensi pembentukan karakter di berbagai lingkungan	Kesadaran orang tua masih rendah	Didukung program edukasi keluarga secara berkelanjutan

Sumber: Analisis Peneliti, 2026 Didukung Oleh Hanifah, 2026; Suharti, 2025; *Webwise*, 2026

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pendidikan demokrasi membutuhkan pendekatan kontekstual dan partisipatif yang didukung oleh lingkungan sosial. Akan tetapi, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa kompetensi digital guru dan kesadaran orang tua berfungsi sebagai variabel moderator yang menentukan keberhasilan implementasi strategi pembelajaran demokrasi di era digital.

4. Model Konseptual Implementasi Pendidikan Demokrasi Berbasis Literasi Digital

Berdasarkan sintesis antara teori dan temuan lapangan, penelitian ini mengembangkan *Integrated Conceptual Model* (ICM) atau model konseptual terintegrasi sebagai kerangka implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran PKn di era digital. Model ini terdiri atas empat komponen utama yang saling berkaitan. Secara konseptual, model implementasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. *Integrated Conceptual Model* Pendidikan Demokrasi Berbasis Literasi Digital

Tahapan	Komponen
<i>Input</i>	Literasi digital guru, kurikulum PKN adaptif, dan dukungan orang tua
<i>Proses</i>	Strategi pedagogis digital, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi tripartit
<i>Output</i>	Kompetensi demokratis siswa (pengetahuan, sikap, dan keterampilan)
<i>Outcome</i>	Terbentuknya <i>digital citizenship</i> yang kritis, empatik, dan bertanggung jawab

Sumber: Analisis Peneliti, 2026

Komponen pertama adalah penguatan pedagogi demokrasi digital. Guru perlu mengadaptasi metode pembelajaran partisipatif dan simulatif ke dalam konteks digital dengan menggunakan kasus *cyberbullying*, ujaran kebencian, maupun konflik media sosial sebagai bahan diskusi pembelajaran demokrasi; Komponen kedua adalah pengembangan literasi digital guru dan siswa. Literasi digital tidak hanya dipahami sebagai kemampuan teknis menggunakan perangkat, tetapi juga mencakup etika komunikasi digital, kemampuan verifikasi informasi, serta kesadaran terhadap dampak perilaku di ruang maya; Komponen ketiga adalah penguatan kolaborasi tripartit antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sekolah berperan sebagai fasilitator pendidikan demokrasi digital, keluarga berperan sebagai pengawas dan teladan perilaku demokratis, sedangkan masyarakat menjadi ruang sosial yang mendukung praktik demokrasi yang sehat; Komponen keempat adalah pengembangan instrumen evaluasi karakter demokratis digital. Evaluasi pembelajaran PKn perlu diperluas tidak hanya pada perilaku siswa dalam interaksi luring, tetapi juga mencakup perilaku digital melalui observasi, portofolio digital, dan penilaian partisipasi siswa dalam diskusi kasus digital.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam membentuk jiwa demokrasi di era digital tidak hanya sebatas transfer pengetahuan dari guru kepada siswa, tetapi juga merupakan proses penyesuaian antara pembelajaran demokrasi dengan realitas kehidupan digital siswa. Temuan utama penelitian ini adalah *Integrated Conceptual Model (ICM)* yang menempatkan pendidikan demokrasi sebagai keterhubungan antara interaksi luring dan daring. Keberhasilan PKn dalam membentuk jiwa demokrasi dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kompetensi digital guru, keterlibatan orang tua, dan ketersediaan instrumen evaluasi perilaku digital siswa. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui metode diskusi dan musyawarah di kelas, tetapi juga harus diintegrasikan dengan pembelajaran etika digital dan pendampingan keluarga. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar guru PKn mengintegrasikan kasus-kasus digital dalam pembelajaran, sekolah mengembangkan instrumen penilaian perilaku demokratis di ruang digital, serta dinas pendidikan menyediakan pelatihan literasi digital berbasis nilai demokrasi bagi guru dan orang tua. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembentukan jiwa demokrasi di era digital hanya dapat tercapai melalui integrasi antara pembelajaran partisipatif, pemanfaatan teknologi secara kritis, dan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anisti, A., Sidarta, V., Imran, M., & Syatir, S. (2025). Tantangan Literasi Digital Generasi Z: Kajian Systematic Literature Review. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 28(1), 117-132.
- Damanik, P. C. I. C., & Kedhaton, A. S. (2026). Strengthening Civic Resilience through Digital Citizenship Education: A Pancasila-Based Pathway to SDG 4 and 16. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Ilmu-Ilmu Sosial, dan Hukum (SENPISSHUM)*, 1(1).
- Dewey, J. (1916). *Democracy And Education: An Introduction To The Philosophy Of Education*. New York, NY: Macmillan.
- Eksara, P. (2025). The Urgency Of Civic Education In Elementary Schools In Facing The Era Of Society 5.0. *International Journal of Students Education (IJoSE)*, 3(3), 99-103.
- Epstein, J. L. (2011). *School, Family, And Community Partnerships: Preparing Educators And Improving Schools*. New York, NY: Routledge.
- Febrianti, I. D. (2024). *Dilema Kecakapan Digital Dan Krisis Santun Berkomunikasi Siswa Sekolah Dasar Di Ruang Siber*. UNESA Universitas Negeri Surabaya.
- Firdaus, F., & Abdulkarim, A. (2022). The Life Skills And Careers Of Citizens In The Digital Age Of Pancasila And Citizenship Education Curriculum Content. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 634, 107-111.
- Gandamana, A., Tamba, R., Siregar, W. M., & Efendi, U. R. (2025). Development Of Teaching Materials For Elementary PKN Basic Concepts Based On Project Citizen Digital To Improve Civic Literacy Of Elementary School Students In Facing The Era Of Society 5.0. *Proceedings of ICIESC 2024*.
- Hanifah, N. (2026). *Pembiasaan Literasi Sebagai Strategi Pengembangan Pendidikan Berkualitas Dalam Perkuliahan Pembelajaran PKN*. Sumedang: Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang

- Helsper, E. J., & Eynon, R. (2010). Digital Natives: Where Is The Evidence?. *British Educational Research Journal*, 36(3), 503-520.
- Hidayatullah, M. I., Wahyudin, D., & Hamdiana, H. (2024). Dampak Negatif Penggunaan Gadget Pada Anak Usia Sekolah Dasar. *IJoEd: Indonesian Journal on Education*, 1(2), 130-135.
- Hughes, J., Robb, J., & Gadanidis, M. (2023). Educating For A Just World: Empowering K-12 Students As Global Democratic Digital Citizens. *Journal of Digital Life and Learning*, 3(2), 69-95.
- Indra, M., & Jasiah, J. (2024). Cyberbullying In Elementary School Students: Should There Be An Anti Bullying Community?. *ZAHRA: Research and Thought Elementary School of Islam Journal*, 5(1), 38-52.
- Indriyana, O., & Mesra, R. (2025). Dinamika Interaksi Media Sosial dan Perkembangan Perilaku Sosial Siswa Sekolah Dasar: Sebuah Studi Etnografi di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Masyarakat Digital*, 1(3), 145-156.
- Japar, M., Hermanto, H., Muryoah, S., Susila, H., & Alfani, H. (2023). Digital Literacy-Based Multicultural Education Through Civic Education In Indonesian Junior High Schools. *Journal of Social Studies Education Research*, 14(4), 328-349.
- Jenkins, H. (2009). *Confronting The Challenges Of Participatory Culture: Media Education For The 21st Century*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Koeswara, E. (2015). Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter Anak. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20(1), 55-70.
- Lickona, T. (1991). *Educating For Character: How Our Schools Can Teach Respect And Responsibility*. New York City: Random House Publishing Group.
- Ma, J. K.-H., & Cheng, S. (2023). *Adolescent Well-Being And ICT Use: Social and Policy Implications*. Cham: Springer International Publishing.
- Madani, I., Aprilianata, & Karo, S. M. (2025). Kewarganegaraan Digital: Etika Dan Tanggung Jawab Peserta Didik Dalam Pemanfaatan AI Pada Mata Pelajaran PPKn di Era Cybernetic 5.0. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 13(1), 18-26.
- Media Digital Interaktif Dalam Pembelajaran PPKn. (2024). *Jurnal FKIP Universitas Cokroaminoto Yogyakarta*.
- Megasari, I. I., Setiawan, M., & Nugraha, D. M. (2025). The Role of Civic Education in Cultivating Responsible Digital Communication Among Elementary School Students. *e-Bangi Journal of Social Science and Humanities*, 22(4).
- Mihardjo, L. (2021). Literasi Digital Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Teknologi Pendidikan Indonesia*, 15(1), 23-35.
- Miladi, N. (2021). *Global Media Ethics And The Digital Revolution*. London: Routledge.
- Murtiningsih, I., Fatimah, S., Harsan, T., & Prasetya, A. (2022). Kendala Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menumbuhkan Civic Disposition Peserta Didik Di Masa Pandemi. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN*, 9(02), 141-147.
- Ninawati, M., Firdaus, A. N., Fathan, A. A., Amelia, D. P., Masnuriyah, F. G., & Zulfikram, R. (2025). Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Digital: Membangun Generasi Yang Berkarakter Civics. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 1707-1711.
- Nur, J., Rahma, S. N. I. W., & Muhallim, M. (2024). Pengembangan Karakter Demokratis Melalui Pemanfaatan Media Pembelajaran Digital. *Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan*, 4, 35-42.

- Nuryadi, M. H. N., Widiatmaka, P., & Yanto, B. E. (2023). Developing Nationalism Character Among the Digital Native Generation Through Formal Education in Indonesia. *Pegem Journal of Education and Instruction*, 13(3), 78-83.
- Piaget, J. (1954). *The Construction Of Reality In The Child*. New York: Basic Books.
- Rumiati, S., & Pudjiastuti, S. R. (2024). *Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Digital*. Bandung: Penerbit Widina Media Utama.
- Rumiati, S., Pudjiastuti, S. R., Karim, A. A., Darmawan, C., & Fitriasari, S. (2023). Model Pengembangan Digital Citizenship Pada Pembelajaran PKn. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), 126-135.
- Santrock, J. W. (2018). *Educational Psychology*. Columbus: McGraw-Hill Education.
- Sartika, S., Rusnaini, R., & Muchtarom, M. (2022). The Use Of The VCT Model in PKn Lessons To Develop Digital Literacy In Students. *Proceedings of the International Conference on Social Science and Education (ICSSE)*, 163-167.
- Shefira, A., Dewi, N. R., & Octaviani, R. (2024). Inovasi Pembelajaran PKN di Era Digital Dengan Pemanfaatan Teknologi Dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 1-10.
- Sonita, A., & Zainil, M. (2025). Pembelajaran Kontekstual Demokrasi Dalam Pendidikan Dasar Di Era Digital. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 15(2), 131-140.
- Suharti, S. (2025). Guru PKN Dorong Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran Lebih Menarik. *RRI.co.id*.
- Surayanah, S., Febriyanti, R. D., Nabila, T. J., Putri, T. P., & Reizvana, Y. Q. A. (2025). The Importance of Planning and Implementing Cognitive, Affective, and Psychomotor Assessments in Primary School Civics Education. *Proceedings Series of Educational Studies*, 2(1), 580-586.
- Vallès-Peris, N., & Domènech, M. (2024). Digital Citizenship At School: Democracy, Pragmatism And RRI. *Technology in Society*, 76, 102448.
- Webwise. (2026). *New Switched On Programme Empowers Primary Pupils To Become Safe, Smart And Responsible Digital Citizens*. *Oide Technology in Education*.
- Wineburg, S. (2024). Students Are "Digital Natives," But Here's Where They Struggle. *American Enterprise Institute*.
- Wulandari, A., & Suranto, A. (2023). How Do Schools In Indonesia Fight Against Cyberbullying?. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 333-340.